7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
10. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 1**

11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan;
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; .
14. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
16. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan pribadi atau badan;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemnerian izim usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan;
20. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPtRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disngkat SKRDKB adalah Surat Keputusan retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala

Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap.

29. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

NAMA.OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Obyek retribusi adalah penerbitan izin usaha perikanan tangkap menggunakan kapal berukuran 10 sampai dengan 30 GT dengan kemampuan jelajah sampai dengan 12 mil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

1. Setiap orang, kelompok atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Gubernur.;
3. Nelayan atau pembudidaya ikan perorangan yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Untuk pemberian izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Gubernur menepkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin

Pasal 8

1. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap orang, kelompok atau badan usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur;
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi rekomendasi dari Bupati/Wali Kota di tempat usaha;
3. Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
4. Bagi usaha perorangan dan uatau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Propinsi Sulawesi Tengah diwajibkan membuka cabang usahanya di Sulawesi Tengah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah melakukan aktifitas usahanya di Sulawesi Tengah;
5. Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan Tenaga Ahli Perikanan.

Pasal 9

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
2. izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan;
3. izin Usaha Perikanan Pembudidayaan;
4. izin Usaha Perikanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran
5. Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan;
6. Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI);
7. Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 10

Izin usaha Penangkapan dan Usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran serta Izin Usaha Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan penerbitan izin usaha baru.

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan;
- (3) Izin tidak berlaku lagi karena:
 - a. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan/melanjutkan kegiatan usahanya;
 - b. pemegang izin perorangan meninggal dunia;
 - c. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin;
 - d. melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
 - f. memindahkan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
 - g. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin usaha perikanan dapat dicabut dalam hal :

- a. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. Tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
- c. Memindahtangankan hak atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
- d. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA